

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	74/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPTSP-2017
	TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	
<p style="text-align: center;">BIDANG PELAYANAN PERIZINAN</p>	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS <u>Drs. HASIROLAN HUTAGALUNG</u> NIP. 19660704 199403 1 013
	NAMA SOP	SOP IZIN USAHA TANAMAN PANGAN UNTUK PENGOLAHAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 2. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin 3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.	Berkas Permohonan Izin: <ol style="list-style-type: none"> 1. FC Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Komposisi kepemilikan saham 3. Susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan 4. FC NPWP pemilik usaha 5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) 6. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur 7. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota 8. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala f. 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik) 9. Jaminan pasokan bahan baku 10. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan 11. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan 12. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan 	